

TAHUN
2023

EVALUASI RENJA TRIWULAN I

 **BAPPEDA**
PROVINSI LAMPUNG



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Hasil Rencana Kerja Triwulan I BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan informasi pencapaian indikator dan target kinerja dalam sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Di samping untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023 juga dapat menjadi instrument perbaikan pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Triwulan berikutnya.

Semoga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I ini dapat bermanfaat dan dipedomani sebagai ukuran pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 dan perbaikan dimasa yang akan datang.

KEPALA BAPPEDA,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan DPA Tahun 2023, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar Rp. 36.828.707.318,-. Melalui anggaran tersebut BAPPEDA melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan yang terbagi kedalam 2 Sasaran Utama dan 1 Sasaran Pendukung.

Dari 3 Program, 15 kegiatan dan 57 sub kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 yang terbagi pada 2 (dua) Sasaran Utama dengan pagu sebesar Rp. 6.803.229.310,- dan 1 (satu) Sasaran Pendukung dengan pagu sebesar Rp. 30.025.478.008,35,-. Realisasi anggaran pada Triwulan I tahun 2023 ini adalah sebesar Rp. 2.782.168.942,- atau 7,55% dengan realisasi kinerja sebesar 6,68%.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut BAPPEDA Provinsi Lampung terus berupaya untuk memperkuat kinerja internal serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perencanaan guna mendukung pelaksanaan *good governance* atau pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Bandar Lampung, Maret 2023

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel dan Daftar Gambar.....	iv
Bab I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
Bab II. Persandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah	5
2.1 Kesesuaian Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Renstra Perubahan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	5
2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2023	10
2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Dokumen Renja dan Renstra.....	12
2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Dokumen Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	21
Bab III. Capaian Kinerja OPD.....	30
3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Rencana Kerja OPD Triwulan I Tahun 2023.....	30
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan I Tahun 2023	39
Bab IV. Hambatan dan Tindaklanjut.....	41
Bab V. Penutup.....	43
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Persandingan Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renja Bappeda Tahun 2023 dengan Perubahan Renstra Bappeda 2019-2024.....	6
Tabel 2.2	Tujuan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022	10
Tabel 2.3	Indikator Sasaran Renja Tahun 2023.....	11
Tabel 2.4	Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra Tahun 2023.....	12
Tabel 2.5	Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan DPA Tahun 2023.....	21
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sub Kegiatan s/d Triwulan I	31
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan I Tahun 2023.....	39

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I.....	30
-------------------	--	----

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, maka perlu adanya kesesuaian antara Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023. Untuk memberikan informasi tingkat capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maka sesuai dengan Pasal 259 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Kepala Perangkat Daerah Provinsi harus melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi dan menyampaikan laporan dimaksud kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan. Bappeda Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah provinsi dan dalam rangka menindaklanjuti Pasal 259 Permendagri No 86 Tahun 2017 tersebut, diharuskan menyusun Dokumen Evaluasi Hasil Renja Bappeda Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2023.

Dokumen evaluasi hasil Renja TW I Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 tersebut akan menjadi bahan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Lampung untuk tahun berikutnya, dan sebagai bahan penyusunan dokumen evaluasi hasil RKPD TW I Provinsi Lampung. Evaluasi terhadap hasil Renja sebagaimana dimaksud mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif, yang dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, lebih luas lagi untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi, maka perlu dipastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi tercapai.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 dipedomani oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sejalan dengan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan di BAPPEDA Provinsi Lampung secara umum ditujukan untuk penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang akan menjadi acuan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan *stakeholder* serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya dokumen Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui progres pencapaian kinerja dan keuangan pada pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Bappeda Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2023.
2. Memastikan bahwa target rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Provinsi Lampung tercapai.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Bappeda Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2023.
4. Menentukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang dianggap perlu untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut.



5. Mewujudkan visi dan misi Renstra Bappeda Provinsi Lampung, dan lebih luas lagi untuk mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah Provinsi Lampung.

Bab II. Persandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renja Dengan Renstra Perangkat Daerah

2.1 Kesesuaian Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Renstra Perubahan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023, bahwa seluruh nomenklatur program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Lampung telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Mengacu pada dokumen Renja tersebut, Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan pada Tahun 2023.

Sementara itu, nomenklatur dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perubahan Renstra Bappeda Provinsi Lampung telah menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk memudahkan evaluasi Renja, maka nomenklatur Renja dalam laporan evaluasi hasil Renja Triwulan I ini menggunakan Kepmendagri 050-5889, mengingat perubahan nomenklatur tersebut juga sudah diakomodir dalam DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Renja Bappeda Provinsi Lampung tersebut, terdapat dalam matrik program, kegiatan dan subkegiatan yang ada dalam dokumen rencana strategi (Renstra) Perubahan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Konsistensi program, kegiatan dan Subkegiatan antara Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Renstra Perubahan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Persandingan Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renja Bappeda Tahun 2023 dengan Renstra Bappeda 2019-2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
SASARAN UTAMA			
A	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
I	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Konsisten
2	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Konsisten
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Konsisten
II	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsisten
5	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Konsisten
6	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsisten
7	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Konsisten
III	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
8	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Konsisten



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Konsisten
10	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsisten
IV	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
11		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tidak Konsisten
12		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tidak Konsisten
13		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Tidak Konsisten
B	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
V	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
14	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
15	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
16	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
18	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
19	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten
20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
21	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten
VI	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
23	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
24	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
27	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Konsisten
28	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Konsisten
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Konsisten
VII	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Konsisten
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Konsisten
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Konsisten



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten
SASARAN PENDUKUNG			
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
VIII	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
38	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Konsisten
39	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsisten
IX	Kegiatan Administrasi Keuangan		
40	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Konsisten
41	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Konsisten
X	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
42	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Konsisten
XI	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
43	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Konsisten
44	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Konsisten
XII	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
45	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsisten
46	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Konsisten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
47	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Konsisten
48	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Konsisten
49	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsisten
50	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsisten
XIII	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
51	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Konsisten
XIV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
52	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Konsisten
53	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsisten
54	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Konsisten
XV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
55	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Konsisten
56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Konsisten
57	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Konsisten

2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPEDA Tahun 2023

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Lampung 2019-2024 dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator kinerja	Target (2024)
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	32%



No.	Tujuan	Indikator kinerja	Target (2024)
	daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
		Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD;	100%
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	95%

Adapun Indikator Sasaran capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung dengan target kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Sasaran Renja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH PROGRAM	PAGU (Rp)	TARGET TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SASARAN UTAMA					
I	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Penetapan RKPD Tepat Waktu;	1 Program	3.253.526.884	Tepat Waktu
		Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;			32 %
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	1 Program	3.549.702.426	100 %
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;			100 %

		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.			95 %
SASARAN PENDUKUNG					
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	1 Program	30.025.478.008,35	A
JUMLAH			3 Program	36.828.707.318	

2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Dokumen Renja dengan Renstra

Untuk mendukung Misi ke-2 dari RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 terdapat 2 sasaran Strategis dalam Revisi Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung 2019-2024 seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2023 terdapat dalam matrik program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Dokumen Revisi Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020. Konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan antara RPJMD, Renstra dan RKPD diperkuat dengan adanya aplikasi SIPPKD Provinsi Lampung.

Tabel 2.4 Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra Tahun 2023

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SASARAN UTAMA 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.							
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	5.360.352.100	100	4.726.852.100
I.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen	%	100	1.744.000.000	100	1.296.490.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu					
1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina terkait perencanaan	Berita Acara	1	190.000.000	1	190.000.000
2.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKP	Berita Acara	1	400.000.000	1	450.000.000
3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKP Murni dan Perubahan	Dokumen	4	1.154.000.000	2	656.490.000
II.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	%	100	1.600.594.000	100	1.983.844.000
4.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ketersediaan E-Database n-1	Masukan	3	258.366.000	3	189.198.500
5.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Upload Informasi Geospasial Tematik pada Aplikasi Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung	Orang	75	505.000.000	75	708.427.500
6.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Kabupaten/ Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung	Orang	60	337.000.000	60	240.518.000
7.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah	Buku	2	500.228.000	2	845.700.000
III.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	%	100	1.615.758.100	100	1.446.518.100
8.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring	Laporan	2	289.950.900	2	296.550.900
9.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RPJMD, dan RKP	Laporan	3	832.990.000	3	643.750.000
10.	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKP	Dokumen	3	492.817.200	3	506.217.200



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan RKPD Perubahan Kab/ Kota					
IV	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	%	100	400.000.000	100	
11.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen Pengelolaan Data Pembangunan daerah dalam SIPD	Dokumen	1	150.000.000		
12.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	100.000.000		
13.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	1	150.000.000		
SASARAN UTAMA 2 : MENINGKATNYA KUALITAS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	%	100	7.403.968.600	100	7.353.718.600
V.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	2.402.350.000	100	2.185.600.000
14.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang	Dokumen	1	233.488.200	1	300.000.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	RKPD) Bidang Pemerintahan	Pemerintahan dan Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat					
15.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah	10	205.472.000	10	220.000.000
16.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen laporan SDG's Tahun 2020, Dokumen Laporan Monev Smart Village dan laporan monitoring evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (LP2KD, Laporan Grand Design Kependudukan, Laporan RAD PG)	Perangkat Daerah	10	538.713.800	10	265.000.000
17.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Grand Design Kependudukan Tahun 2022	Laporan	1	154.000.000	1	150.000.000
18.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia	Dokumen	1	580.916.000	1	500.000.000
19.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Strategis Daerah Penanganan Anak Putus Sekolah dan dokumen proceeding FGD Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah	6	200.000.000	6	200.000.000
20.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	6	284.108.200	6	244.948.200



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen LP2KD, RAD PG, RAT	Laporan	2	205.651.800	1	305.651.800
VI.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	%	100	2.131.718.600	100	2.214.968.600
22.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Buku Peluang Investasi	Dokumen	2	373.000.000	1	370.256.300
23.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan pelaksanaan asistensi/ FGD di Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	208.948.400	5	301.778.400
24.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Movev dan Buku Statistik Perekonomian	Perangkat Daerah	5	205.557.000	5	210.961.600
25.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan FGD pengembangan pariwisata Provinsi Lampung dan Laporan FGD pengembangan kawasan industri	Laporan	1	390.106.000	1	306.197.900
26.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dan perkebunan	Dokumen	1	236.726.000	1	229.003.200
27.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan	Perangkat Daerah	4	326.966.200	4	300.408.400
28.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Movev dan capaian kinerja perencanaan di sektor pertanian, Perkebunan, kelautan dan perikanan dan Dokumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Impelementasi KPB	Perangkat Daerah	4	257.898.000	4	202.672.000
29.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan	Laporan	1	132.517.000	1	293.690.800



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Harmonisasi Perencanaan Program Unggulan lingkup Industri dan Pariwisata					
VII.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	2.869.900.000	100	2.953.150.000
30.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP yang menjadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Dokumen	1	482.000.000	1	565.125.900
31.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP yang menjadi kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Perangkat Daerah	4	500.000.000	4	500.000.000
32.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	260.000.000	4	202.500.000
33.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	158.000.000	1	181.500.000
34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Kewilayahan dan Dokumen kebijakan KLHS revisi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Dokumen	1	569.900.000	1	619.424.100
35.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang	Perangkat Daerah	5	200.000.000	5	182.100.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kewilayahan dan Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan GRK					
36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	5	200.000.000	5	202.500.000
37.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung untuk Sektor Lahan, Limbah, dan Energi	Laporan	2	500.000.000	1	500.000.000
SASARAN PENDUKUNG : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KINERJA INSTANSI BAPPEDA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	20.638.244.482	100	20.650.494.482
VIII.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	%	100	637.976.000	100	587.976.000
38.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Revisi Renstra, Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan)	Dokumen	13	383.189.000	11	353.189.000
39.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	Laporan	7	254.787.000	7	234.787.000
IX.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100	15.658.728.092	100	15.597.369.400
40.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Penyediaan Gaji	Orang	115	15.494.945.400	115	15.494.945.400



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Tunjangan ASN					
41.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	Laporan	2	163.782.692	2	102.424.000
X.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	%	100	41.080.000	100	55.000.000
42.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Laporan	3	41.080.000	3	55.000.000
XI.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang mengikuti Diklat/ Bimtek	%	100	391.387.000	100	266.033.040
43.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket	276	165.850.000	130	139.750.000
44.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	90	225.537.000	30	126.283.040
XII.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	%	100	736.068.490	100	915.343.642
45.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	115.328.140	12	438.112.000
46.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Paket	12	25.579.000	12	10.000.000
47.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	Paket	12	25.486.600	12	16.580.000
48.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah layanan pengadaan ATK	Paket	12	30.815.750	12	19.953.950
49.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	Laporan	1	184.800.000	1	79.200.000
50.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	Laporan	1	354.059.000	1	351.497.692
XIII.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana perkantoran	%	100	45.327.500	100	747.723.000
51.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	116	45.327.500	25	747.723.000
XIV.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa	%	100	2.430.654.000	100	1.661.363.800



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penunjang perkantoran					
52.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	1	424.000.000	1	424.000.000
53.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	Laporan	1	66.675.000	1	27.790.000
54.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor	Laporan	1	1.939.979.000	1	1.209.573.800
XV.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	%	100	697.023.400	100	819.685.600
55.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	14	337.434.000	13	341.570.000
56.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Unit	270	26.400.000	250	21.778.600
57.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	2	333.189.400	3	456.337.000
JUMLAH			%	100	33.402.565.182	100	32.731.065.182

Nomenklatur dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 masih berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2020, sementara nomenklatur dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perubahan Renstra Bappeda Provinsi Lampung sudah berdasarkan Kepmen 050-5889 Tahun 2021. Namun demikian, nomenklatur dan target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tabel 2.4 kolom Renja diatas sudah berdasarkan Kepmen 050-5889 Tahun 2021, mengingat perubahan nomenklatur sudah diakomodir dalam DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023.

2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Dokumen Renja dengan DPA

Perencanaan pembangunan pada tahun 2023 merupakan tahun ke-4 periode Revisi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan Revisi Renstra BAPPEDA 2019-2024. Pada tahun 2022 BAPPEDA Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dalam memenuhi target yang tercantum dalam Renja Bappeda Tahun 2023. Alokasi pagu anggaran tahun 2023 serta kesesuaian antara Renja dan DPA BAPPEDA TA. 2023 dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5 Perbandingan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja dan DPA Tahun 2023

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SASARAN UTAMA 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.							
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	5.360.352.100	100	3.253.526.884
I.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	1.744.000.000	100	1.188.371.000
1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina terkait perencanaan	Berita Acara	1	190.000.000	1	217.116.000
2.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Berita Acara	1	400.000.000	1	255.085.400
3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD Murni dan Perubahan	Dokumen	4	1.154.000.000	4	716.169.600
II.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	%	100	1.600.594.000	100	1.124.856.942
4.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ketersediaan E-Database n-1	Masukan	3	258.366.000	3	159.272.000
5.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Upload Informasi Geospasial	Orang	75	505.000.000	80	311.448.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tematik pada Aplikasi Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung					
6.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Kabupaten/ Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung	Orang	60	337.000.000	60	196.270.000
7.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah	Buku	2	500.228.000	2	457.866.942
III.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	%	100	1.615.758.100	100	772.001.342
8.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring	Laporan	2	289.950.900	2	60.321.300
9.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RPJMD, dan RKPD	Laporan	3	832.990.000	3	484.150.000
10.	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPDP Perubahan Kab/ Kota	Dokumen	3	492.817.200	3	227.530.042
IV	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	%	100	400.000.000	100	168.297.600
11.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen Pengelolaan Data Pembangunan daerah dalam SIPD	Dokumen	1	150.000.000	1	127.560.000
12.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	27.654.600
13.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	150.000.000	1	13.083.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemerintah Provinsi					
SASARAN UTAMA 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	%	100	7.403.968.600	100	3.549.702.426
V.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	2.402.350.000	100	1.537.384.942
14.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dan Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	1	233.488.200	1	41.170.200
15.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah	10	205.472.000	10	105.471.800
16.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen laporan SDG's Tahun 2020, Dokumen Laporan Monev Smart Village dan laporan monitoring evaluasi	Perangkat Daerah	10	538.713.800	10	117.753.800



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (LP2KD, Laporan Grand Design Kependudukan, Laporan RAD PG)					
17.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Grand Design Kependudukan Tahun 2022	Laporan	1	154.000.000	4	454.155.000
18.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia	Dokumen	1	580.916.000	1	280.994.000
19.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Strategis Daerah Penanganan Anak Putus Sekolah dan dokumen proceeding FGD Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah	6	200.000.000	6	173.800.000
20.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	6	284.108.200	6	154.688.200
21.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen LP2KD, RAD PG, RAT	Laporan	2	205.651.800	1	209.351.942
VI.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	%	100	2.131.718.600	100	749.875.542
22.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Buku Peluang Investasi	Dokumen	2	373.000.000	2	172.370.142
23.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan pelaksanaan asistensi/ FGD di Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	208.948.400	5	46.315.800
24.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Buku Statistik Perekonomian	Perangkat Daerah	5	205.557.000	5	66.710.400



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan FGD pengembangan pariwisata Provinsi Lampung dan Laporan FGD pengembangan kawasan industri	Laporan	1	390.106.000	1	125.360.000
26.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dan perkebunan	Dokumen	1	236.726.000	4	88.744.000
27.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan	Perangkat Daerah	4	326.966.200	4	138.688.200
28.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di sektor pertanian, Perkebunan, kelautan dan perikanan dan Dokumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Impelementasi KPB	Perangkat Daerah	4	257.898.000	4	66.560.000
29.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencasnaan Program Unggulan lingkup Industri dan Pariwisata	Laporan	1	132.517.000	1	45.127.000
VII.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	2.869.900.000	100	1.262.441.942
30.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP yang menjadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Dokumen	1	482.000.000	2	409.257.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP yang menjadi kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Perangkat Daerah	4	500.000.000	4	217.500.000
32.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	260.000.000	4	26.840.000
33.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	158.000.000	1	26.981.000
34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Kewilayahan dan Dokumen kebijakan KLHS revisi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Dokumen	1	569.900.000	1	329.727.000
35.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan dan Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan GRK	Perangkat Daerah	5	200.000.000	5	97.874.000
36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	5	200.000.000	5	24.814.942
37.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung untuk Sektor Lahan, Limbah, dan Energi	Laporan	2	500.000.000	2	129.448.000
SASARAN PENDUKUNG : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KINERJA INSTANSI BAPPEDA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan	%	100	20.638.244.482	100	30.025.478.008,35



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemerintah Daerah					
VIII.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	%	100	637.976.000	100	293.302.000
38.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Revisi Renstra, Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan)	Dokumen	13	383.189.000	11	190.814.200
39.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	Laporan	7	254.787.000	6	102.487.800
IX.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100	15.658.728.092	100	20.444.084.886,35
40.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115	15.494.945.400	123	20.349.957.886,35
41.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	Laporan	2	163.782.692	2	94.127.000
X.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	%	100	41.080.000	100	48.721.692
42.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Laporan	3	41.080.000	3	48.721.692
XI.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang mengikuti Diklat/ Bimtek	%	100	391.387.000	100	468.375.000
43.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket	276	165.850.000	149	243.125.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
44.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	90	225.537.000	104	225.250.000
XII.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	%	100	736.068.490	100	6.103.927.930
45.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	115.328.140	12	258.868.840
46.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Paket	12	25.579.000	12	33.984.400
47.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	Paket	12	25.486.600	12	31.068.000
48.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah layanan pengadaan ATK	Paket	12	30.815.750	12	35.000.750
49.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	Laporan	1	184.800.000	1	188.100.000
50.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	Laporan	1	354.059.000	1	5.556.905.940
XIII.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana perkantoran	%	100	45.327.500	100	175.549.600
51.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	116	45.327.500	25	175.549.600
XIV.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	%	100	2.430.654.000	100	1.748.848.650
52.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	1	424.000.000	1	352.960.000
53.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	Laporan	1	66.675.000	1	66.675.000
54.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor	Laporan	1	1.939.979.000	2	1.329.213.650
XV.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	%	100	697.023.400	100	742.668.250
55.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	14	337.434.000	13	493.938.000
56.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala	Unit	270	26.400.000	250	27.800.000

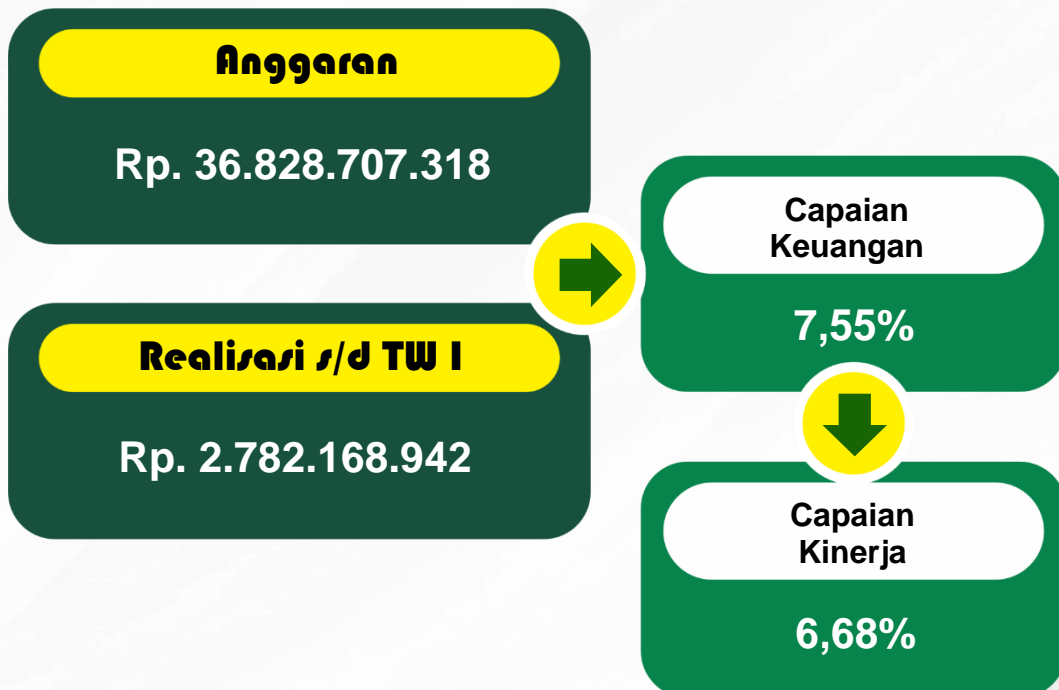


NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perlengkapan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	2	333.189.400	2	220.930.250
JUMLAH			%	100	33.402.565.182	100	36.828.707.318,35

Bab III. Capaian Kinerja PD

3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Rencana Kerja PD Triwulan I Tahun 2023

BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2023 melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2023 dengan Anggaran sebesar Rp. 36.828.707.318,- yang terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 6.803.229.310,- dan Sasaran Pendukung Rp. 30.025.478.008,35,-. Hingga Triwulan I Tahun 2023 total realisasi keuangan pada Triwulan I sebesar Rp. 2.782.168.942,- atau setara dengan 7,55 persen.



Gambar 3.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I

Berikut realisasi capaian kinerja pada Sub Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan I :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sub Kegiatan s/d Triwulan I

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SASARAN UTAMA 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.							
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100			
I.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	33,33	33,33%	
1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	Berita Acara	1	1	100%	
2.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	1	0	0%	
3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD Murni dan Perubahan	Dokumen	2	0	0%	
II.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	%	100	0	0%	
4.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N-1	Masukan	3	0	0%	
5.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah dokumen kajian PNBPD Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik	Orang	75	0	0%	
6.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	Orang	60	0	0%	
7.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan	Buku	2	0	0%	



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)					
III.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	%	100	16,67	16,67%	
8.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring	Laporan	2	1	50,00%	
9.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RKPd	Laporan	2	0	0%	
10.	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPd dan RKPd Perubahan Kab/ Kota	Dokumen	3	0	0%	
IV	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	%	100	0	0%	
11.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen Pengelolaan Data Pembangunan daerah dalam SIPD	Dokumen	1	0	0%	
12.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	0	0%	
13.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	1	0	0%	
SASARAN UTAMA 2 : MENINGKATNYA KUALITAS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan	%	100			



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah					
IV.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	25	25%	
14.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	0	0%	
15.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	1	100%	
16.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	Perangkat Daerah	10	0	0%	
17.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	0	0%	
18.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	Dokumen	1	0	0%	
19.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang di Asistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan	Perangkat Daerah	6	3	50%	



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
20.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	Perangkat Daerah	6	0	0%	
21.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022	Laporan	2	0	0%	
V.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	%	100	0	0%	
22.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Daerah dan Buku Peluang Investasi	Dokumen	2	0	0%	
23.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung dan Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung	Perangkat Daerah	5	0	0%	
24.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan dokumen Laporan Monev	Perangkat Daerah	5	0	0%	



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		serta Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan)					
25.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	Laporan	1	0	0%	
26.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	0	0%	
27.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	4	0	0%	
28.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB	Perangkat Daerah	4	0	0%	
29.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	Laporan	1	0	0%	
VI.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur	%	100	0	0%	



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Kewilayahan					
30.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pengembangan Wilayah	Dokumen	1	0	0%	
31.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Perangkat Daerah	4	0	0%	
32.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	0	0%	
33.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	0	0%	
34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciaptakaryaan Provinsi Lampung	Dokumen	1	0	0%	
35.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	5	0	0%	
36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian	Perangkat Daerah	5	0	0%	



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan					
37.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	Laporan	2	0	0%	
SASARAN PENDUKUNG : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KINERJA INSTANSI BAPPEDA							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100			
VII.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	%	100	22,73	22,73%	
38.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Revisi Renstra, Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan)	Dokumen	11	4	45,45%	
39.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	Laporan	7	0	0%	
VIII.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100	12,50	12,50%	
40.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115	115	100%	



NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	Laporan	2	0	0%	
IX.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	%	100	16,67%	16,67%	
42.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Laporan	3	1	33,33%	
X.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang mengikuti Diklat/ Bimtek	%	100	0	0%	
43.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket	275	0	0%	
44.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	50	0	0%	
XI.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	%	100	4,17	4,17%	
45.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	0	0%	
46.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Paket	12	2	16,67%	
47.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	Paket	12	1	8,33%	
48.	Penyediaan layanan Bahan/Material	Jumlah layanan pengadaan ATK	Paket	12	0	0%	
49.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	Laporan	1	0	0%	
50.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	Laporan	1	0	0%	
XII.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana perkantoran	%	100	0	0%	
51.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	116	0	0%	
XIII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	%	100	0%	0%	

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		%	KET
				TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	1	0	0,00%	
53.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	Laporan	1	0	0,00%	
54.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor	Laporan	1	0	0,00%	
XIV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	%	100	0	0%	
55.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	14	0	0%	
56.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Unit	270	0	0%	
57.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	2	0	0%	
PERSENTASE TOTAL			%	100	7,52	7,52%	

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan I Tahun 2023

Sasaran capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan tingkat capaian dan realisasi Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TW I)	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	0%	Masih dalam tahap penyusunan
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai	32%	-	0%	Masih dalam tahap penyusunan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TW I)	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;				
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100 %	100%	100%	Pada indikator ini target telah tercapai dimana indicator sasaran renstra PD telah selaras dengan indicator sasaran pada perubahan RPJMD 2019-2024 mengingat antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja telah terintegrasi dalam aplikasi SIPPKD.
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100 %	100%	100%	Pada indikator ini target telah tercapai dimana indicator sasaran renja PD telah selaras dengan indicator sasaran pada RKPD mengingat antara RKPD dan Renja telah terintegrasi dalam aplikasi SIPPKD.
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	95 %	-	0%	Masih dalam proses penyusunan
SASARAN PENDUKUNG						
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA.	Nilai SAKIP Bappeda	BB	-	0%	Masih dalam tahap penilaian

Bab 4. Hambatan dan Tindak lanjut

4.1 Hambatan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja BAPPEDA pada Triwulan I adalah 6,68%, dengan realisasi anggaran sebesar 7,55%. Capaian kinerja dan realisasi anggaran masih sedikit karena pemakaian anggaran masih sebatas pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta belanja kebutuhan dari setiap bidang di lingkup BAPPEDA Provinsi Lampung. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Dengan demikian Secara umum tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Bappeda Provinsi Lampung. Namun demikian, tidak adanya kendala bukan menjadi alasan bagi Bappeda Provinsi Lampung untuk tidak membuat tindak lanjut dalam menyikapi Tugas Pokok dan Fungsi utamanya pada aspek perencanaan kegiatan. Oleh karena itu pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) antisipasi terhadap pelaksanaan yang *off schedule*, mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan untuk mengefisienkan pekerjaan di bidang perencanaan.

4.2 Tindak Lanjut Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2023

1. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah

disusun, sekaligus mensosialisasikannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;

2. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola sub kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
3. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
4. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);
5. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda secara efektif dan efisien, maka diharapkan seluruh aplikasi terkait perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah dapat terintegrasi.

Bab V. Penutup

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung, penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I BAPPEDA Provinsi Lampung juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung atas capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK).

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada Bappeda Provinsi Lampung sebesar 7,55% untuk capaian kinerja dan 6,68% untuk serapan anggaran. Secara umum tingkat capaian ini menunjukkan hasil yang masih rendah. Hal itu karena program, kegiatan, dan sub kegiatan dari setiap bidang dimulai pada triwulan II, sehingga realisasi anggaran dan capaian kinerja belum begitu besar.

Dengan telah disusunnya dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2023 BAPPEDA Provinsi Lampung, kiranya dapat menjadi bahan rujukan untuk memperkuat kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung pada triwulan berikutnya.



LAMPIRAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	65.165.361.946			100	30.025.478.008,35	14,84	2.379.886.042	14,84	7,93	14,84	2.379.886.042	14,84	3,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	100	1.946.200.560			100	293.302.000	31,25	41.182.400	31,25	14,04	31,25	41.182.400		2,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, PK Murni, PK Perubahan, Rencana Aksi, GAP dan GBS, DPA Murni dan DPA Perubahan, Indikator Kinerja Individu	34	1.169.055.590			8	190.814.200	5	33.480.000	62,50	17,55	5	33.480.000	14,71	2,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	21	777.144.970			6	102.487.800		7.702.400		7,52		7.702.400		0,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100	5.057.437.486.118			100	20.444.084.886,35	50	1.632.065.887	50,00	7,98	50	1.632.065.887		0,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	345	5.023.535.142.118			115	20.349.957.886,35	115	1.623.745.887	100,00	7,98	115	1.623.745.887	33,33	0,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	6	339.023.440			2	94.127.000		8.320.000		8,84		8.320.000		2,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100	182.050.000			100	48.721.692	33,33	2.320.000	33,33	4,76	33,33	2.320.000		1,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	9	182.050.000			3	48.721.692	1	2.320.000	33,33	4,76	1	2.320.000	11,11	1,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100	829.624.080			100	468.375.000		5.000.000		1,07		5.000.000		0,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	390	416.950.000			447	243.125.000									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	90	412.674.080			104	225.250.000		5.000.000		2,22		5.000.000		1,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100	280.458.727.902			100	6.103.927.930	4,17	515.266.402	4,17	8,44	4,17	515.266.402		0,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	1.238.112.000			12	258.868.840									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	36	33.100.000			12	33.984.400	2	7.946.800	16,67	23,38	2	7.946.800	5,56	24,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	62.780.000			12	31.068.000	1	6.373.000	8,33	20,51	1	6.373.000	2,78	10,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	36	893.379.185			12	35.000.750		6.999.900		20,00		6.999.900		0,78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3	217.800.000			1	188.100.000		14.100.000		7,50		14.100.000		6,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	116.345.736.052			1	5.556.905.940		479.846.702		8,64		479.846.702		0,41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5.1.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	1.045.713.000			100	175.549.600										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	75	1.045.713.000			139	175.549.600										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100	4.668.251.400			100	1.748.848.650	172.770.873			9,88		172.770.873			3,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	1.403.440.000			1	352.960.000	51.247.629			14,52		51.247.629			3,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	143.290.000			1	66.675.000										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	3	3.121.521.400			1	1.329.213.650	121.523.244			9,14		121.523.244			3,89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100	31.145.607.658			100	742.668.250	11.280.480			1,52		11.280.480			0,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	41	980.760.000			19	493.938.000	11.280.480			2,28		11.280.480			1,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	750	114.178.600			330	27.800.000										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Kantin dan Ruang Laktasi	9	20.196.221.658			2	220.930.250										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100	17.662.188.551			100	3.253.526.884	8,33	218.724.100	8,33	6,72	8,33	218.724.100	8,33	1,24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	6.288.690.000			100	1.188.371.000	33,33	93.126.900	33,33	7,84	33,33	93.126.900			1,48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	3	652.000.000			1	217.116.000	1	85.880.000	100,00	39,55	1	85.880.000	33,33	13,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.2.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	3	1.485.700.000			1	255.085.400		4.250.700		1,67		4.250.700			0,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKP (Murni dan Perubahan), Ranwal RPJPD 2022-2045, dan Dokumen Teknokratis RPJMD 2025-2029	8	4.150.990.000			4	716.169.600	2.996.200			0,42		2.996.200			0,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100	5.735.523.640			100	1.124.856.942	89.925.200			7,99		89.925.200			1,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N+1	3	655.458.140			1	159.272.000	6.724.500			4,22		6.724.500			1,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD	225	1.978.927.500			80	311.448.000	18.679.700			6,00		18.679.700			0,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.2.3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	180	741.788.000			60	196.270.000	1.021.000			0,52		1.021.000			0,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
5.1.2.2.4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	6	2.359.350.000			2	457.866.942			63.500.000			13,87			63.500.000			2,69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100	4.787.974.911			100	772.001.342													Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring	6	981.583.479			1	60.321.300													Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.3.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD, Dokumen Evaluasi RKP, Dokumen Evaluasi RPJMD 2019-2024	9	2.130.812.500			3	484.150.000													Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.3.4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKP Murni dan RKP Perubahaan Kab/Kota	9	1.675.578.932			3	227.530.042													Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100	850.000.000			100	168.297.600			35.672.000			21,20			35.672.000			4,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen proceeding pengelolaan e-database	3	300.000.000			1	127.560.000			26.170.000			20,52			26.170.000			8,72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.4.2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	3	250.000.000			1	27.654.600			5.887.000			21,29			5.887.000			2,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.2.4.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen proceeding pembinaan SIPD Kabupaten/Kota dan OPD Pemerintah Provinsi	3	300.000.000			1	13.083.000			3.615.000			27,63			3.615.000			1,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan movev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100	23.185.808.566			100	3.549.702.426	2,5		183.558.800	2,50		5,17	2,5		183.558.800	2,50		0,79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100	6.727.336.000			100	1.537.384.942	7,5		95.510.800	7,50		6,21	7,5		95.510.800			1,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	3	1.047.285.000			1	41.170.200			4.266.800			10,36			4.266.800			0,41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan	30	639.265.000			10	105.471.800	1		15.284.000	10,00		14,49	1		15.284.000	3,33		2,39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja dalam penyusunan Renstra/Renja Laporan Capaian TPI/ SDGs Tahun 2022 Provinsi Lampung	30	732.775.000			10	117.753.800			20.600.000			17,49			20.600.000			2,81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dokumen RPKD 2024-2029, Dokumen RAD SDGs 2024-2029, dan Dokumen RAD Pangan Gizi Tahun 2024-2029	3	822.285.000			3	454.155.000			19.200.000			4,23			19.200.000			2,33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.3.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Recana Aksi Tahunan (RAT) Penganggulangan Kemiskinan Provinsi	3	1.350.311.000			1	280.994.000		13.400.000		4,77		13.400.000		0,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18	619.265.000			6	173.800.000	3	14.360.000	50,00	8,26	3	14.360.000	16,67	2,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	18	742.723.200			6	154.688.200		5.400.000		3,49		5.400.000		0,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2022	3	773.426.800			1	209.351.942		3.000.000		1,43		3.000.000		0,39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100	7.100.546.066			100	749.875.542		34.000.000		4,53		34.000.000		0,48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Buku Peluang Investasi 2023 dan Dokumen Perencanaan Perekonomian Sektor Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Pendapatan, dan Keuangan	3	1.220.498.231			2	172.370.142		10.200.000		5,92		10.200.000		0,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung Bidang Perekonomian	15	1.013.899.194			5	46.315.800		5.300.000		11,44		5.300.000		0,52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Buku Statistik Perekonomian (Triwulan & Tahunan) Sektor Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Pendapatan, dan Keuangan	15	901.768.948			5	66.710.400		3.000.000		4,50		3.000.000		0,33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Penyusunan Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata dan UMKM di Provinsi Lampung	3	631.010.234			1	125.360.000		4.800.000		3,83		4.800.000		0,76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	3	642.389.250			1	88.744.000		2.000.000		2,25		2.000.000		0,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Asistensi Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	12	1.032.851.350			4	138.688.200		3.800.000		2,74		3.800.000		0,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Laporan Movev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Impelementasi KPB (Kartu Petani Berjaya)	12	964.096.459			4	66.560.000		3.000.000		4,51		3.000.000		0,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen Potensi dan Pengembangan Pembangunan Daerah Sektor Pariwisata	3	964.096.459			1	45.127.000		1.900.000		4,21		1.900.000		0,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	9.357.926.500			100	1.262.441.942		54.048.000		4,28		54.048.000		0,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Bidang Infrastruktur Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dokumen Bidang Infrastruktur Sektor Perhubungan	3	1.886.699.960			2	409.257.000		13.400.000		3,27		13.400.000		0,71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Infrastruktur	12	846.500.000			4	217.500.000		6.620.000		3,04		6.620.000		0,78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan Penyusunan Laporan Money dan Capaian Kinerja Perencanaan di Bidang Infrastruktur	12	670.275.000			4	26.840.000		3.500.000		13,04		3.500.000		0,52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3	600.765.000			1	26.981.000		3.500.000		12,97		3.500.000		0,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023	3	2.068.389.100			1	329.727.000		11.028.000		3,34		11.028.000		0,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	15	601.365.000			5	97.874.000		2.000.000		2,04		2.000.000		0,33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Laporan Money dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	15	670.275.000			5	24.814.942									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan emisi GRK Provinsi Lampung untuk sektor lahan, limbah, dan energi dan Jumlah dokumen laporan proceeding hasil pemeriksaan validasi dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian	3	2.013.657.440			2	129.448.000		14.000.000		10,82		14.000.000		0,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja													6,68	7,55				



BAPPEDA

PROVINSI LAMPUNG



Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 223, Tanjungkarang Pusat,
Pengajaran, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35119